

## Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Zulhendra<sup>1\*</sup>, Fadilla<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akademi Akuntansi Indonesia Padang

\*Corresponding Author: [zulhendra@unespadang.ac.id](mailto:zulhendra@unespadang.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 20/07/2024  
Diterima, 03/08/2024  
Dipublikasi, 17/08/2024

### Kata Kunci:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Realisasi Belanja

### Keywords:

Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Realization

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa, pemanfaatan dan pengalokasian dana desa, dan faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan komitmen yang kuat dalam penatausahaan yang cermat, pemanfaatan anggaran yang efisien, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Evaluasi rutin menjadi bagian integral dalam proses ini untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

### Abstract

*This research aims to understand the management of village funds, the utilization and allocation of village funds, and the factors that hinder the management of village funds. The data collection methods used in this study are Interview and Documentation Methods. The results show that the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of West Sumatra Province in 2020 demonstrates a strong commitment to careful administration, efficient budget utilization, and strict supervision of every expenditure. These steps are intended to ensure transparency and accuracy in financial recording in accordance with statutory regulations. Regular evaluations are an integral part of this process to continuously improve regional financial management performance sustainably.*

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi

yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum negara/daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pembendaharaan, setiap pejabat menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang bersangkutan. Menteri/pemimpin lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja perangkat daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah ini merupakan landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, hingga penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini.

## **KAJIAN TEORI**

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan (dalam Gerung, 2022). Konsep ini mencerminkan sejauh mana seseorang atau sebuah organisasi mampu memenuhi tujuan dan target yang telah ditetapkan (dalam Sadiyah, 2024). Kinerja mencakup berbagai aspek yang saling terkait, termasuk efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan (dalam Sihombing, 2019).

Efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (dalam Sumenge, 2019). Ini adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai hasil yang diharapkan (dalam Idrus, 2019). Efisiensi, di sisi lain, berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada, seperti waktu, tenaga, dan uang, untuk mencapai hasil tersebut (dalam Susan, 2019). Efisiensi menilai bagaimana sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk memaksimalkan output dengan input yang minimal (dalam Marsondang, 2019).

Kualitas adalah dimensi penting lainnya dalam kinerja, yang menilai sejauh mana hasil yang dicapai memenuhi atau bahkan melebihi standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan (dalam Hulu, 2022). Tingkat kesesuaian hasil dengan harapan ini sering kali menjadi indikator utama dari keberhasilan suatu kegiatan atau proses (dalam Gerung, 2022). Produktivitas, yang merupakan rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan, juga menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja (dalam Syahputra, 2021). Produktivitas mengukur efisiensi proses produksi dan seberapa efektif sumber daya digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa (dalam Baiti, 2020).

Selain itu, kepuasan pelanggan adalah aspek kunci dalam mengukur kinerja, terutama dalam konteks organisasi yang berorientasi pada pelayanan (dalam Albadiyah, 2022). Kepuasan

pelanggan menilai sejauh mana kebutuhan dan harapan pengguna atau penerima hasil terpenuhi, tingkat kepuasan ini sering kali menjadi cerminan langsung dari kualitas pelayanan atau produk yang diberikan (Tjiptono dalam Sinollah, 2019).

Dalam organisasi, kinerja dapat dievaluasi pada berbagai tingkat, mulai dari individu, tim, departemen, hingga keseluruhan organisasi (dalam Hina, 2024). Penilaian kinerja biasanya dilakukan melalui berbagai metode dan alat, seperti penilaian kinerja individu, indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPIs*), dan analisis laporan keuangan (dalam Damayanti, 2023). Evaluasi ini tidak hanya membantu dalam memahami sejauh mana tujuan telah tercapai, tetapi juga dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut (dalam Idrus, 2019).

### **Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen keuangan tahunan yang menggambarkan rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran (dalam Nahumuri, 2019). APBD merupakan instrumen penting dalam manajemen keuangan publik di tingkat daerah, yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan penggunaan sumber daya keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (dalam Anggraeni, 2020).

Menurut Mardiasmo, seorang pakar dalam bidang keuangan publik, APBD adalah alat utama dalam desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Dia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan dana publik. Sementara itu, Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggarisbawahi pentingnya APBD dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Beliau menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme APBD dapat memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan mendukung pembangunan yang inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pengumpulan data**

#### **1. Studi Lapangan**

Menurut Sugiyono (2017) studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung ke perusahaan guna memperoleh data primer yang diperlukan. Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung guna memperoleh data primer. Studi lapangan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat)

#### **2. Studi Kepustakaan**

Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan adalah langkah penting dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penulisan dan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang

berhubungan dengan penulisan telah berkembang serta kesimpulan apa yang telah dicapai. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori-teori yang digunakan dalam penelitian tugas akhir mengenai Analisis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2017), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga ingin mengetahui hal-hal mendalam dari responden tersebut. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

#### **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis, dapat berupa buku teks, surat kabar, film, naskah, artikel, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan secara dokumentasi berupa gambar (Andra Tersiana, 2018).

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan karakteristik yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan dari berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data yang bervariasi (triangulasi) dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang sangat beragam. Teknik analisis data yang diterapkan adalah model Miles dan Huberman. Berdasarkan penjelasan Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Proses analisis data kualitatif ini bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai titik kejenuhan.

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Sugiyono 2018:292). Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data, diambil dan dicatat untuk pertama kalinya berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperdalam pembahasan. Berdasarkan sumber data di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang didapatkan langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas, yaitu metode yang berusaha memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung di Kantor dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat). Data kuantitatif diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pebendahaan (KANWIL DJPB Provinsi Sumatera Barat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2020 menunjukkan komitmen dalam menjalankan proses penatausahaan yang cermat, pemanfaatan anggaran yang efisien, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran anggaran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan transparan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi rutin juga menjadi bagian penting dalam proses ini, dimana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

### Penatausahaan APBD

Penatausahaan APBD Propinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan. Setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat secara rinci dan akurat. Pencatatan ini tidak hanya mencakup jumlah dana yang tersedia dan digunakan, tetapi juga menunjukkan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dan program pemerintah daerah. Pelaporan rutin dilakukan kepada pihak terkait, termasuk audit internal dan eksternal, guna memastikan bahwa APBD dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

**Tabel 1.** Realisasi Belanja Daerah Triwulan 1 Tahun 2020

Jenis Belanja	Nominal (Rp)
Belanja Operasional	2,823,519,128,150
- Belanja Pegawai	1,745,172,847,816

- Belanja Barang dan Jasa	744,238,732,695
- Belanja Bunga	765,676,975
- Belanja Hibah	332,986,980,664
- Belanja Bansos	354,900,000
Belanja Modal	139,597,470,061
Belanja Tak Terduga	15,232,553,489

Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/>

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi belanja daerah Propinsi Sumatera Barat pada triwulan pertama tahun 2020. Belanja operasional mendominasi dengan total Rp 2,823,519,128,150, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bansos. Selain itu, terdapat alokasi untuk belanja modal sebesar Rp 139,597,470,061 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi aset tetap, serta belanja tak terduga sebesar Rp 15,232,553,489 untuk kebutuhan mendesak tidak terduga.

### Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

Berikut adalah tabel yang menampilkan rincian sumber pendapatan dan nominalnya untuk Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020:

**Tabel 2.** Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

Sumber Pendapatan	Nominal (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	912,760,757,179
Pajak Daerah	533,177,163,645
Retribusi Daerah	35,235,073,314
Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	2,122,316,329
Lain-lain Pendapatan yang Sah	342,226,203,891
Pendapatan Transfer	4,631,633,815,725
Dana Bagi Hasil Pajak	24,113,892,888
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	2,032,505,200
Dana Alokasi Umum	4,404,752,730,054
Dana Insentif Khusus	120,499,771,583
Dana Desa	70,234,916,000
Pendapatan Lain-lain yang Sah	3,244,985,028
Hibah	3,223,595,028
Pendapatan Lain-lain	21,390,000

Sumber: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumbar/id/>

Tabel di atas menyajikan rincian pendapatan daerah Propinsi Sumatera Barat pada triwulan pertama tahun 2020. Pendapatan asli daerah didominasi oleh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, pendapatan transfer terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak / SDA, dana alokasi umum, dana insentif khusus, dan dana desa. Terakhir, pendapatan lain-lain yang sah mencakup hibah dan pendapatan lain-lain yang bersumber dari berbagai sumber eksternaaktor Pendukung APBD.

## Faktor Pendukung Keberhasilan APBD Sumbar

Beberapa faktor pendukung keberhasilan APBD Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 meliputi:

- a. Kepatuhan dalam Pajak dan Retribusi: Tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah propinsi.
- b. Dukungan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat: Adanya dukungan dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana insentif khusus telah memberikan sumber pendapatan tambahan yang penting bagi APBD propinsi.
- c. Manajemen Keuangan yang Profesional: Implementasi manajemen keuangan yang profesional dan sistematis dalam penatausahaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan telah menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengelolaan.

## KESIMPULAN

Pendapatan daerah pada tahun 2020 menunjukkan performa yang solid dengan total mencapai Rp 5,547,639,557,932. Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 912,760,757,179 didominasi oleh kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Sementara itu, pendapatan transfer sebesar Rp 4,631,633,815,725 berasal dari dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, serta dana insentif khusus dan dana desa dari pemerintah pusat. Pendapatan lain-lain yang sah, termasuk hibah dan pendapatan lainnya, juga memberikan kontribusi yang signifikan. Evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui transfer dana, menjadi faktor penentu dalam pencapaian pendapatan yang optimal. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan daerah serta memperkuat pengawasan terhadap penerimaan yang lebih efektif.

Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Realisasi belanja daerah pada triwulan pertama tahun 2020 mencapai total Rp 3,117,946,008,211. Belanja operasional mendominasi dengan alokasi sebesar Rp 2,823,519,128,150, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bansos. Sementara itu, belanja modal sebesar Rp 139,597,470,061 dan belanja tak terduga sebesar Rp 15,232,553,489 memberikan dukungan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kebutuhan mendesak yang tidak terduga.

Evaluasi terhadap kinerja belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dengan tepat untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan transparansi dalam pelaporan belanja, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap pengeluaran untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Dengan demikian, meskipun terdapat pencapaian yang positif dalam pengelolaan APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2020, tantangan dan peluang untuk peningkatan masih tetap ada. Penerapan praktik terbaik dalam manajemen keuangan publik, peningkatan dalam diversifikasi pendapatan daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, N. H. (2020). Pengembangan Teknologi 4.0 dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut (Agro Maritim 4.0). *Agro Maritim*, 4(0), Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.
- Artanti, N. Y. (2010). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD): Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2007 [Undergraduate thesis, Universitas Sanata Dharma]. Universitas Sanata Dharma Repository.
- Artarini, H., & Sari, M. K. (2023). Pengaruh komunikasi pimpinan terhadap produktivitas kerja tim Field Coaxial Engineering PT. Link Net Tbk Regional Pusat di Pondok Indah Jakarta Selatan. *Communication Lens*, II. E-ISSN: 2715-7768.
- Assidiqi, B. (2016). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. *Jurnal Profita*, Edisi 5, 1-20.
- Damayanti, D. A., Fitriani, R., & Wahyudin. (2023). Analisis pengukuran kinerja perusahaan melalui Key Performance Indicator pada PT. XYZ. *Jurnal Serambi Engineering*, VIII(2), 5099-5105.
- Deswira, A. (2022). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72-88. e-ISSN: 2657-1080; p-ISSN: 1858-3687.
- Elsa, E. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2022 [Undergraduate thesis, Universitas Negeri Padang]. Universitas Negeri Padang Repository.
- Gerung, C. J., Dotulong, L. O. H., & Raitung, M. Ch. (2022). Analisis perbandingan kinerja PNS dan THL pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa di masa pandemi Covid-19 [Comparative analysis of the performance of civil servants and THL at the Minahasa Regency Education Office]. *Jurnal EMBA*, 10(2), 418-428. ISSN 2303-1174.
- Hina, B. J. R., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Peran evaluasi kinerja dalam organisasi. *AMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 106-117. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v2i1.786>
- Hulu, E., Mendrofa, Y., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Indomarco Adi Prima cabang Medan Stok Point Nias Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(4), 106. ISSN: 2550-0414.
- Idrus, L. (2019). Evaluasi dalam proses pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 1-20. P-ISSN: 2407-8107; E-ISSN: 2685-4538.
- Mahmudin. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan Qudwah Mart di Lebak. *Journal of Islamic Economics and Business Studies*, 5(1). E-ISSN: 2797-3816.
- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2022). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Teluk Wondama periode 2017-2021. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 237-253. e-ISSN: 2623-0895; p-ISSN: 1858-4905.
- Marwati, S., & Marsondang, A., Purwanto, B., & Mulyati, H. (2019). Pengukuran efisiensi serta analisis faktor internal dan eksternal bank yang memengaruhinya [Measurement of Efficiency and Analysis of Bank Internal and External Factors that Affect It]. *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, 10(1), 48-62. P-ISSN: 2088-9372, E-ISSN: 2527-8991.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. Retrieved from [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika\\_pembangunan/index](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index)
- Palupi, D., Dassaad, Riyanti, & Wahyudi, B. (2022). Analisis kinerja keuangan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelum pandemi

- dan saat pandemi COVID-19 tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 1-20. P-ISSN: 2541-5255; E-ISSN: 2621-5306.
- Pratiwi, E. (2022). Analisis kinerja keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kebumen. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 1-20. E-ISSN: 2722-5828.
- Sadiyah, S. H., Paulina, E., & Sunandar, N. (2023). Analisis strategi PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam mempertahankan kinerja keuangan di era pandemi Covid-19: Studi kasus pada PT Permodalan Nasional Madani Unit Nagrak. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 46-82. <https://doi.org/10.1234/jurnalaktiva.v6i1.46-82>
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11. e-ISSN: 2656-3649.
- Sihombing, P. L. T., & Batoebara, M. U. (2019). Strategi peningkatan kinerja karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan di CV Multi Baja Medan. *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN*, Edisi 6(2). Universitas Dharmawangsa.
- Sinollah, & Masruro. (2019). Pengukuran kualitas pelayanan (Servqual ± Parasuraman) dalam membentuk kepuasan pelanggan sehingga tercipta loyalitas pelanggan (Studi Kasus pada Toko Mayang Collection cabang Kepanjen). *Jurnal Dialektika*, 4(1), 1-20.
- Sumenge, M. S., Singkoh, F. C., & Kasenda, V. (2019). Efektivitas kerja aparatur sipil negara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3). ISSN: 2337-5736. Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 952. P-ISSN: 2407-8107, E-ISSN: 2685-4538.
- Tandiasik, Y., Toatubun, N., & Thane, S. (2023). Analisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 98-110. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.230>